PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH DENGAN DIMODERASI OLEH VARIABEL DESENTRALISASI DAN BUDAYA ORGANISASI (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS)

Restu Agusti

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru

ABSTRAK

PENDAHULUAN

Penganggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik. Penganggaran sektor publik terkait dalam proses penetuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penyusunan anggaran menekankan pada pendekatan *Buttom-up Planning,* hal ini sesuai dengan pendapat Argirys (1952) yang menyarankan perlunya bawahan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran karena menurutnya partisipasi dalam penyusunan anggaran diyakini dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah.

Partisipasi sebagai salah satu prinsip *good governance,* dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat dimana para *stakholde*r sebagai partisipan saling mempengaruhi dan berbagi kontrol atas inisiatif pembangunan,keputusan dan juga sumberdaya yang akan mempengaruhi mereka (World Bank,1996 dalam Jagat,2006).Partisipan bukan merupakan aktor tunggal,Pemerintah Pusat, Menteri, DPR,Pemerintah Daerah,DPRD,Organisasi publik, pihak swasta serta warga negara merupakan bagian dari partisipan (Brinkerhoff,2002 dalam Jagat,2006).

Partisipasi anggaran merupakan tingkat seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh individu didalam menentukan dan menyusun anggaran yang ada dalam divisi atau bagiannya, baik secara periodik maupun tahunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Kinerja aparat pemerintahan merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu atasan dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial, dimana kinerja dapat diukur dari seberapa jauh kemampuan kinerja dalam mencapai target yang dianggarkan.

Pengukuran kinerja mencakup berbagai aspek sehingga dapat memberikan informasi yang efisien dan efektif dalam pencapaian kinerja tersebut. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang digunakan dalam penyusunan anggaran, maka setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran (Kepmendagri No 29 Tahun 2002).

Menurut Dwiyanto (2002) dalam Nora (2008), pada instansi pemerintah, kinerja pelayanan publik merupakan salah satu dimensi strategis dalam menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dewasa ini. Pemerintah daerah memiliki peluang untuk merumuskan kebijakan dan program sesuai aspirasi masyarakat di daerahnya. Oleh karenanya, salah satu indikator penting dari keberhasilan otonomi daerah adalah implikasinya terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik.

Anggaran berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, dengan adanya partisipasi anggaran diharapkan kinerja aparat pemerintah daerah akan meningkat, karena anggaran dipakai sebagai suatu system pengendalian untuk mengukur kinerja. Kemudian dari itu semua pihak ikut terlibat dan diberi kesempatan untuk membuat anggaran sesuai bidangnya masing-masing, maka kinerja yang dihasilkan akan baik.

Supomo dan Indriantoro (1998) menemukan hubungan yang positif dan signifikan antara anggaran partisipatif dengan kinerja aparat pemerintah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Sumarno (2005) menemukan adanya pengaruh dan hubungan manajerial. Pada sektor publik, penelitian yang dilakukan Siskawati (2004) menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja, yang mana hasil keputusan ini mendukung penelitian Kenis (1979) dan Indriantoro (1993), (2004), Sardjito dan Osmad (2007).

Variabel-variabel yang dapat memoderating hubungan partisipasi anggaran terhadap kinerja antara lain adalah variabel desentralisasi dan budaya organisasi. Menurut Galbraith (1973) dalam Nor (2007) struktur organisasi yang terdesentralisasi diperlukan pada kondisi administratif, tugas dan tanggung jawab yang semakin kompleks, yang selanjutnya memerlukan pendistribusian otoritas pada manajemen yang lebih rendah. Pelimpahan wewenang yang terdesentralisasi diperlukan karena dalam struktur yang terdesentralisasi para manajer/bawahan diberikan wewenang dan tanggungjawab yang lebih besar dalam pengambilan keputusan.

Gul dkk.,(1995) menemukan bahwa partisipasi anggaran terhadap kinerja akan berpengaruh positif dalam organisasi yang pelimpahan wewenangnya bersifat desentralisasi. Sedangkan Riyanto (1999) menemukan sebaliknya, yaitu desentralisasi tidak mempengaruhi hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja. Variabel lain yang turut mempengaruhinya adalah budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan merupakan suatu sistem nilai-nilai, keyakinan dan norma-norma yang unik dimiliki secara bersama oleh anggota suatu organisasi.

Penelitian tentang pengaruh budaya organisasi terhadap keefektifan partisipasi anggaran dalam meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah yang dilakukan oleh Sardjito dan Osmad (2007) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan budaya organisasi dan komitmen organisasi dalam memoderasi partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat Pemda dan untuk melihat seberapa besar pengaruh moderating desentralisasi dan budaya organisasi terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

Partisipasi Penyusunan Anggaran dengan Kinerja Aparat Pemda

Partisipasi anggaran adalah tingkat seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh individu didalam menetukan dan menyusun anggaran yang ada dalam divisi atau bagiannya, baik secara periodik maupun tahunan. Partisipasi anggarn menunjukkan pada luasnya bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran oleh unit kerjanya dan pengaruh tujuan pusat pertaggungjawaban anggaran mereka. Sedangkan kinerja Aparat Pemerintah adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu pimpinan dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Partisipasi penyusunan anggaran pada dasarnya mengizinkan manejer tingkat bawah mempertimbangkan bagaimana anggaran dibentuk (Hansen dan Mowen, 2000).

Partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Handoko (1998) dalam Nor (2007) menyatakan partisipasi sebagai alat pencapaian tujuan, partisipasi juga sebagai alat untuk mengintegrasikan kebutuhan individu dan organisasi. Partisipasi yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja, yaitu ketika suatu tujuan dirancang dan secara partisipatif disetujui, maka karyawan akan menginternalisasikan tujuan yang ditetapkan dan memiliki rasa tanggung jawab pribadi utnuk mencapainya, karena mereka ikut terlibat dalam proses penyusunan anggaran tersebut.

Brownell dan Mcinnes (1986) menemukan bahwa partisipasi yang tinggi dalam penyusunan anggaran meningkatkan kinerja manajerial. Dalam organisasi sektor publik, Sardjito dan Osmad (2007) menyebutkan bahwa semakin tinggi partisipasi anggaran maka semakin meningkat kinerja aparat pemerintah daerah.

Sementara itu Indriantoro (1993), Siskawati (2004), Nor (2007), menemukan bahwa hubungan yang positif dan signifikan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial. Selanjutnya Indriantoro (2000) melaporkan bahwa Argyris (1952), Becker dan Green (1962), Bass dan Leavitt (1963), Brownell, (1982c), Brownell dan Mcinnes (1986), menemukan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Cherrington dan Cherrington (1973), Milani(1975), Kenis (1979), Brownell dan Hirst (1986), menemukan bahwa partisipasi anggaran mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja manajerial. Sementara itu Stedry (1960), Bryan dan Locke (1967) dan Sumarno (2005) menemukan adanya pengaruh negatif antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial.

Untuk menguji kembali pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat pemda, maka peneliti menyusun hipotesis sebagai berikut :

H_1 : Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah kabupaten Bengkalis.

Desentralisasi

Menurut Hansen dan Mowen (2000) Desentralisasi adalah praktek pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang yang lebih rendah. Cheema dan Rondinelli (1983) dalam Bastian (2005) mendefinisikan desentralisasi sebagai perpindahan wewenang atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintahan, manajemen dan pengambilan keputusan dari tingkat nasional ke tingkat daerah.

Struktur desentralisasi menunjukkan manajemen puncak mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada manajer menengah dan bawah dalam bentuk pembuatan keputusan (Gordon dan Narayanan, 1984). Danserau (1975) dalam Gaspers (2003) menganggap bahwa atasan sering berupaya menjamin peningkatan komitmen organisasi dari bawahan dengan memberikan wewenang dan pengaruh yang lebih besar kepada bawahan.

Desentralisasi pada saat ini telah menjadi azas penyelenggaraan pemerintahan yang diterima secara dengan berbagai macam bentuk aplikasi di setiap negara. Penerimaan desentralisasi sebagai azas dalam penyelenggaraan pemerintahan disebabkan oleh fakta bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat dieslenggarakan secara sentralisasi, mengingat kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan budaya local serta

adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Prasojo,dkk 2006) .

Desentralisasi memiliki berbagai macam tujuan. Secara umum tujuan tersebut dapat diklasifikasi kedalam dua variabel penting, yaitu peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (yang merupakan pendekatan *structural efficiency model*) dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan (yang merupakan pendekatan *local democracy model*). Setiap negara lazimnya memiliki titik berat yang berbeda dalam tujuan-tujuan desentralisasinya. Hal itu sangat ditentukan oleh kesepakatan dalam konstitusi terhadap arah pertumbuhan (*direction of growth*) yang akan dicapai melalui desentralisasi. Bahkan dalam kurun waktu tertentu titik berat tujuan desentralisasi di setiap negara akan mengalami perbedaan. (Prasojo, dkk, 2006).

Menurut Galbraith (1973) dalam Nor (2007) struktur organisasi yang terdesentralisasi diperlukan pada kondisi administratif, tugas dan tanggungjawab yang semakin kompleks, yang selanjutnya memerlukan pendistribusian otoritas pada manajemen yang lebih rendah. Pelimpahan wewenang yang terdesentralisasi diperlukan karena dalam struktur yang terdesentralisasi para manajer/bawahan diberikan wewenang dan tanggungjawab yang lebih besar dalam pengambilan keputusan.

Pada penelitian Gul dkk. (1995) menemukan bahwa partisipasi anggaran terhadap kinerja akan berpengaruh positif dalam organisasi yang pelimpahan wewenangnya bersifat desentralisasi. Riyanto (1999) menemukan sebaliknya, yaitu desentralisasi tidak mempengaruhi hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja. Selanjutnya Nor (2007) mengadakan penelitian terhadap organisasi pelayanan kesehatan (rumah sakit) dan organisasi pendidikan (perguruan tinggi) yang ada di provinsi D.I Yogyakarta, dan hasilnya menunjukkan nilai negatif tidak signifikan yang berarti desentralisasi tidak mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian :

H_2 : Desentralisasi berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja aparat pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Budaya Organisasi.

Menurut Siagian (2002) budaya organisasi mengacu ke suatu sistem makna bersama yang dianut anggota-anggota yang membedakan perusahaan itu terhadap perusahaan lain, sedangkan Luthans dalam Helmi (2005) menekankan budaya organisasi dalam perspektif yang berbeda, dimana budaya organisasi merupakan individu-individu yang saling berhubungan dalam organisasi, mereka saling berhubungan dengan saling melengkapi norma-norma, peraturan formal

organisasi, prilaku, kebiasaan, tugas, system, kelompok yang hanya dimengerti oleh anggota. Elemen-elemen ini merupakan manifestasi dari budaya organisasi.

Trisnaningsih (2007) menyatakan bahwa budaya dalam organisasi merupakan nilai yang dianut bersama oleh anggota organisasi, cenderung membentuk perilaku kelompok. Robbins (1996) mendefinisikan budaya organisasi sebagai suatu sistem pemahaman bersama yang dianut oleh anggota organisasi yang membedakannya dari organisasi lain. Robbins mengemukakan fungsi budaya organisasi yaitu sebagai pembeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya, untuk membangun rasa identitas bagi anggota organisasi, mempermudah tumbuhnya komitmen, dan meningkatkan kemantapan sistem sosial.

Budaya organisasi sebagai hasil kesepakatan bersama akan menjadikan anggota organisasi tersebut mempunyai rasa tanggung jawab dalam mengimplementasikan aspek-aspek penting budaya organisasi tersebut. Hal ini akan mendorong timbulnya itikad baik atau komitmen anggota terhadap organisasi yang menaunginya.

Konsep budaya organisasi yang digunakan Hofstede dkk (1990) dalam Sardjito dan Osmad (2007), dalam penelitian lintas budaya antar departemen dalam perusahaan pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep dimensi budaya nasional yang banyak digunakan dalam penelitian-penelitian perbedaan budaya antar negara. Menurutnya antara budaya nasional dan budaya organisasi merupakan fenomena yang identik. Perbedaan kedua budaya tersebut tercermin dalam manifestasi budaya kedalam nilai dan praktek. Perbedaan budaya tingkat organisasi umumnya terletak pada prakteknya dibandingkan dengan perbedaan nilai-nilai. Perbedaan budaya organisasi selanjutnya dapat dianalisis pada tingkat unit organisasi dan sub organisasi (Susanti, 2002) dalam Sardjito dan Osmad (2007).

Praktek budaya organisasi mempunyai kaitan erat dengan praktek-praktek pembuatan keputusan anggaran. Faktor budaya organisasi ini digunakan dalam penelitian ini sebagai variabel yang mempunyai pengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran.

Menurut Hofstede dkk (1990) dalam Sardjito (2007) dimensi praktek budaya organisasi yang mempunyai kaitan erat dengan praktek pembuatan keputusan partisipasi anggaran yaitu orientasi pada orang dan orientasi pada pekerjaan.

Holmes dan Marsden (1996) dalam Sardjito (2007) menyatakan budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap perilaku, cara kerja dan motivasi para manajer dan bawahannya untuk mencapai kinerja organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan budaya, ditentukan bahwa dimensi budaya mempunyai pengaruh terhadap penyusunan anggaran dalam meningkatkan kinerja manajerial.

Budaya organisasi adalah komponen yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja aparat. Budaya organisasi pada sisi internal aparatur akan memberikan sugesti kepada semua prilaku yang diusulkan oleh organisasi agar dapat dikerjakan, penyelesaian yang sukses, dan akibatnya akan memberikan keuntungan pada aparatur itu sendiri karena akan memberikan kepercayaan diri terhadap pekerjaannya. Sifat-sifat ini akan dapat meningkatkan harapan aparat tersebut agar kinerjanya meningkat.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sardjito dan Osmad Muthaher (2007) mengenai Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah: Budaya organisasi dan komitmen Organisasi sebagai variabel moderating, menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel budaya organisasi dalam memoderasi partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah.

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian :

H_3 : Budaya Organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja aparat pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Gambar 1. Model Penelitian

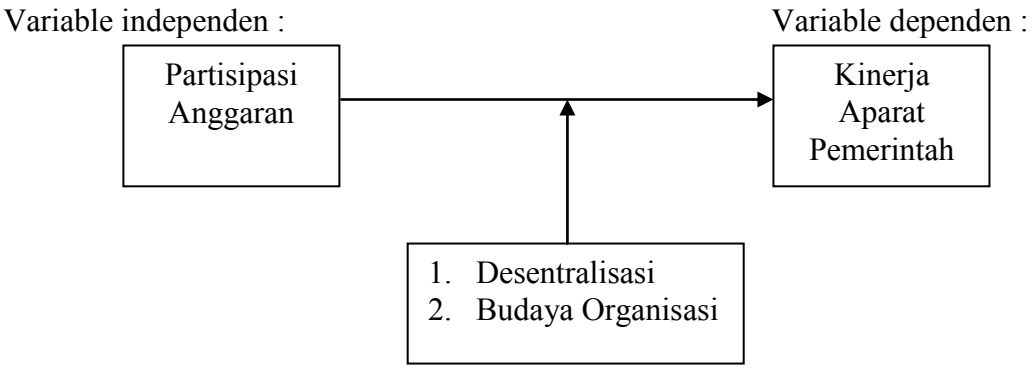

METODE PENELITIAN

Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Dinas- dinas yang ada di pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dan dengan tujuan efisiensi waktu, maka populasi yang diambil adalah kantor-kantor dinas yang lokasinya berdekatan.

Sampel penelitian ini adalah Pejabat yang berada dibawah kepala dinas, yaitu kepala subdinas dan kepala subbagian yang ada di masing-masing dinas di Kantor

Dinas Pemerintah Kabupaten Bengkalis, yang masa jabatan nya minimal 1 tahun dan Pendidikan minimal D3.

Variabel Dependen

Variabel dependen penelitian ini adalah kinerja aparat pemerintah daerah. Variable ini diukur menggunakan beberapa instrument yang telah digunakan oleh Siskawati (2004), Supomo danIndriantoro (1999). Instrument terdiri dari 18 butir pertanyaan dengan menggunakan instrument pertanyaan berskala Likert lima poin dari sangat tidak setuju (1) hingga sangat setuju (5).

Variabel Independen

Variabel independen pada penelitian ini adalah partisipasi anggaran. Pada penelitian ini, untuk mengukur keterlibatan dan pengaruh bawahan dalam proses penyusunan anggaran digunakan instrumen dari Kenis yang dikembangkan oleh Mardiasmo (2001), yang terdiri dari 5 butir pertanyaan dengan skala *Likert* 1-5. Dimana skala 1 menunjukkan sangat sedikit dan 5 menunjukkan sangat banyak.

Variabel Moderating

Miah dan Mia (1996) dalam Nor (2007) menyatakan Desentralisasi adalah seberapa jauh manajer yang lebih tinggi mengijinkan manajer dibawahnya untuk mengambil keputusan secara independen. Variabel ini diukur dengan menggunakan Instrumen yang telah dikembangkan Gordon dan Narayanan (1984) dalam Nor (2007). Kelima pertanyaan menggunakan skala satu sampai dengan lima. Skala rendah (poin 1) menunjukkan tingkat desentralisasi yang rendah dan skala tinggi (poin 5) menunjukkan tingkat desentralisasi yang tinggi.

Budaya organisasi pada intinya merupakan sebuah sistem dari nilai-nilai yang bersifat umum. Budaya organisasi juga merupakan suatu prilaku atau kebiasaan dalam organisasi. Secara spesifik variabel budaya organisasi menjelaskan orientasi budaya pada dinas pemerintahan daerah. Variabel budaya organisasi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Hofstede (1990, dikutip dalam Sardjito 2007). Instrumen terdiri dari 4 elemen budaya organisasi yang berorientasi pada orang dan 4 elemen budaya organisasi yang berorientasi pada pekerjaan yang berskala *Likert* lima poin dari skala (1) menyatakan sangat tidak setuju hingga skala (5) menyatakan sangat setuju sebanyak 8 pertanyaan.

Untuk menguji hipotesis ini digunakan regresi berganda dengan interksi. Fokus utama regresi pada penelitian ini adalah signifikan indeks koefisien dan sifat pengaruh interaksi variabel moderating (Desentralisasi dan Budaya Organisasi) dengan partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuesioner yang disebar kepada 12 dinas adalah sebanyak 100 buah, sebanyak 69 buah kuesioner kembali, setelah dilakukan pengeditan data dan persiapan buat pengolahan data sebanyak 6 buah tidak dapat dipergunakan karena pengisian kuesioner yang tidak lengkap. Sehingga kuesioner yang dapat digunakan sebagai data dalam penelitian ini berjumlah 63 buah. Untuk lebih jelasnya demografi responden dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2 Demografi Responden

Ukuran Sampel	Jumlah	Persentase (%)
Jenis kelamin		
• Pria	41	65,08%
• Wanita	22	34,92%
Jabatan		
• Kabag	24	38,1%
• Kasubbag	39	61,9%
Lama menjabat		
• 1-5 tahun	52	82,5%
• > 5 tahun	11	17,5%
Pendidikan		
• D3	1	1,59%
• S1	43	68,25%
• S2	19	30,16%

1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Hasil pengujian kualitas data dengan uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Variabel	Factor Loading	Keterangan	Cronbach Alpha	Keterangan
Partisipasi Anggaran (PA)	0,589-0,834	Valid	0,721	Reliabel
Kinerja Aparat Pemda (KN)	0,422-0,893	Valid	0,915	Reliabel
Desentralisasi (DS)	0,427-0,714	Valid	0,739	Reliabel
Budaya Organisasi (BO)	0,636-0,907	Valid	0,800	Reliabel

Sumber : Pengolahan Data SPSS

Dari pengujian yang telah dilakukan berdasarkan tabel diatas, maka didapatkan hasil untuk uji validitas adalah valid dengan nilai *Factor Loading* diatas 0,4. Dan untuk uji reliabilitas, seluruh variabel dinyatakan reliabel dengan nilai *Cronbach Alpha* > 0,5.

2. Pengujian Normalitas Data

Hasil pengujian normalitas dengan grafik p-plot untuk variabel dependen Kinerja Aparat Pemda dapat dilihat pada lampiran 1. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa untuk variabel adopsi titik menyebar disekitar garis diagonal. Dengan demikian berarti data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal.

Hasil pengujian asumsi klasik multipel regresi memperlihatkan bahwa diantara variabel independen tidak terdapat multikolinearitas, autokorelasi dan heterodaskedisitas seperti terlihat pada lampiran 2.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa untuk menguji hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda . Adapun hasil analisis data untuk masing-masing hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.7 yaitu :

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Data Masing-Masing Hipotesis

Hipotesis	R^2	F	Sig	t	Koef β	Ket
Hipotesis I	0,621	99,793	0,000	9,990	0,666	X_1
Hipotesis II	0,730	53,056	0,010	2,651	0,242	[X_1 x X_2]
Hipotesis III	0,715	49,311	0,002	-3,172	-0,631	[X_1 x X_3]

Sumber : Pengolahan Data SPSS

a. Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis yang pertama diajukan adalah untuk menguji apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemda di Kabupaten Bengkalis. Dengan kata lain, apakah semakin meningkatnya partisipasi dalam penyusunan anggaran maka kinerja aparat pemda akan semakin meningkat pula.

Jika p value (sign) < dari 0,05 maka H1 diterima,sebaliknya apabila p value (sign) > 0,05 maka H1 ditolak. Dalam penelitian ini, nilai p value (sign) 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hasil penelitian ini berhasil menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemda.

Adanya koef β sebesar 0,666 menyatakan adanya pengaruh positif antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemda sehingga semakin tinggi partisipasi penyusunan anggaran, maka kinerja aparat pemda juga akan semakin meningkat. Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa variabel kinerja aparat pemda dipengaruhi oleh partisipasi dalam penyusunan anggaran sebesar 62% dan sisanya 38% dipengaruhi variabel-variabel lain.

Partisipasi penyusunan anggaran merupakan keterlibatan seluruh manajer (baik kasubag sampai kabag) dalam suatu dinas untuk melakukan kegiatan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran. Dengan adanya keterlibatan tersebut akan mendorong para kabag/kasubbag untuk bertanggung jawab terhadap masing-masing tugas yang diembannya sehingga para kabag akan meningkatkan kinerjanya agar mereka dapat mencapai sasaran / target yang telah ditetapkan dalam anggaran. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan yang positif antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemda.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sardjito dan Osmad (2007) yang menemukan hubungan positif signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemda.

b. Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua yang diajukan adalah menguji apakah desentralisasi berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemda di Kabupaten Bengkalis.

Jika p value (sign) < dari 0,05 maka H2 diterima,sebaliknya apabila p value (sign) > 0,05 maka H2 ditolak. Dalam penelitian ini, nilai p value (sign) 0,010 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hasil penelitian ini berhasil menerima hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Desentralisasi berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemda. Adanya koef β2 sebesar 0,242 menyatakan bahwa desentralisasi berpengaruh positif terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemda, artinya semakin tinggi pengaruh struktur desentralisasi terhadap partisipasi anggaran akan mengakibatkan kinerja aparat pemda semakin meningkat, sebaliknya semakin rendah pengaruh struktur desentralisasi terhadap partisipasi anggaran maka kinerja aparat pemda juga akan turun. Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa dengan adanya variabel desentralisasi sebagai variabel moderating, maka persentase pengaruh partisipasi penyusunan anggaran meningkat menjadi 73% terhadap kinerja aparat pemda, sedangkan sisanya 27% dipengaruhi variabel-variabel lain.

Penelitian ini mendukung temuan penelitian Gul,dkk (1995) dalam Nor (2007) yang menemukan bahwa hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemda akan berpengaruh positif dalam organisasi yang pelimpahan wewenangnya bersifat desentralisasi.

c. Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga yang diajukan adalah untuk menguji apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja aparat pemda di Kabupaten Bengkalis.

Jika p value (sign) < dari 0,05 maka H3diterima,sebaliknya apabila p value (sign) > 0,05 maka H3 ditolak. Dalam penelitian ini, nilai p value (sign) 0,002 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Interaksi budaya organisasi terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja aparat pemda mempunyai hubungan negatif, ditunjukkan dengan koefisien β_3 -0,631. Dengan demikian, hasil penelitian ini menyatakan bahwa tingkat partisipasi anggaran akan mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja aparat pemda, pada budaya organisasi yang rendah, dan akan berpengaruh negatif pada budaya organisasi yang tinggi. Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa masuknya budaya organisasi sebagai variabel moderating, maka pengaruh partisipasi penyusunan anggaran meningkat menjadi 71,5% terhadap kinerja aparat pemda sedangkan sisanya sebesar 28,5% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan desentralisasi dan budaya organisasi sebagai variabel moderating nya dengan objek penelitian kepala bagian (eselon III) dan kepala subbagian (eselon IV) pada dinas pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemda. Pengujian ini berhasil membuktikan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa partisipasi yang tinggi dalam penyusunan anggaran akan meningkatkan kinerja aparat pemda. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Sardjito dan Osmad (2006) yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemda.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel desentralisasi berpengaruh positif terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemda. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Gull dkk dlm Nor (2006) yang menyatakan bahwa desentralisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemda.

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penyusunan anggaran akan mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja aparat pemda pada budaya organisasi yang tinggi, dan akan berpengaruh positif pada budaya organisasi yang rendah .Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemda.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak memiliki keterbatasan. Diantara keterbatasan tersebut adalah penelitian ini menerapkan metode survei yang dilaksanakan dengan pertanyaan tertulis. Hal ini menimbulkan persepsi yang berbeda dari responden dengan keadaan sesungguhnya. Penelitian ini hanya mengambil variabel desentralisasi dan budaya organisasi sebagai variabel pemoderasi sehingga hanya membatasi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemda pada dua variabel pemoderasi saja. Selain itu penelitian ini hanya di lakukan pada beberapa dinas yang ada di Kabupaten Bengkalis yang berjabatan Eselon III dan Eselon IV, karena keterbatasan waktu dan kemampuan penulis. Apabila diperbanyak populasi dan sampelnya kemungkinan akan mendapatkan hasil yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Anthony, R, N., John Dearden., Norton,M,Bedford, 1993, Sistem Pengendalian Manajemen, Jakarta.

Bastian, Indra, 2005, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta.

Bratakusuma, Deddy Supriady dan Solihin, Dadang, 2004, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, PT Gramedia pustaka utama, Jakarta.

Darlis, Edvan. 2001. Analisis Pengaruh Komitmen Organisasional dan Ketidakpastian Lingkungan terhadap Hubungan antara Partisipasi Anggaran dengan Senjangan Anggaran, Simposium Nasional Akuntansi IV. 30-31 Agustus. Bandung. 523-541.

Darlis, Edvan, 2005, Pengaruh Budaya Paternalistik Terhadap Keefektifan Partisipasi Anggaran dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Riau), Jurnal KIAT, Volume 7, No 1, Juni 2005.

Direktorat Jendral Otonomi Daerah, Direktorat Pengelolaan Keuangan Daerah Keputusan Mentri Dalam Negeri No 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan,Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jakarta. 2002.

Fauziati, P, 2002, Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja dan kepuasan kerja dengan JRI sebagai variabel intervening, Tesis UGM.

Fitri, Nora, 2008, Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Pemda dengan Struktur Desentralisasi sebagai Variabe Moderating, Skripsi Unri

Firman,2005, "Bahan Paparan RASK Pemprov DKI Jakarta ", Jakarta.

Gaspersz, Jefri, 2003, Analisis Hubungan Antara Struktur Desentralisasi, Partisipasi Anggaran dengan Job Relevant Information, VOI Manajer serta Pengaruhnya Terhadap Job Related Outcome, SNA VI, Surabaya.

Hansen dan Mowen, 2000, Akuntansi Manajemen, Erlangga, Jakarta.

Helmi, Herlina, 2005, Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Manufaktur di Pekanbaru, Skripsi Unri.

Ikhsan, Arfan, 2008, Metodologi Penelitian Akuntansi Keperilakuan/Arfan Ikhsan, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Indriantoro N dan Bambang S, 1999, Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, BPFE, Jogjakarta.

Jagat. 2006. Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Public Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Mardiasmo, 2001, Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Agustus Hal 441-456.

----------, 2006, Akuntansi Sektor Publik, Andi Offset, Yogyakarta.

Mulyadi, 2001, Akuntansi Manajemen, Salemba Empat, Jakarta.

Nafarin, Moch, 2000, Penganggaran Perusahaan, Salemba Empat, jakrta.

Nordiawan, Deddy, 2006, Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.

Nor, Wahyudin, 2007, Desentralisasi dan Gaya Kepemimpinan sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Manajerial, SNA X, Makassar

Nugroho, Bhuono Agung, 2005, Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS, Edisi I, Andi Offset, Yogyakarta.

Prasojo, Eko,2003, "Agenda Politik dan Pemerintahan di Indonesia : Desentralisasi Politik, Reformasi Birokrasi dan Good Governance ", Bisnis & Birokrasi, Vol XI,No 1, Januari.

Prastito, Arif, 2004, Cara Mudah Mengatasi Masalah Statistik dan Rancangan Percobaan dengan SPSS 12, Cetakan I, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, www.bigs.or.id/dokpub/PP105_2000.

----------, Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, www.presidensby.info/DokumenUU.php/138.

Riyanto, Bambang. 1999, The effect of Attitude, Strategy and Decentralization on Effectiveness of Budget Participation, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia (JRAI), Vol. 2, No. 2, hal 269-286.

Robbins, Stephen P. 1994, Teori Organisasi : Struktur, desain dan aplikasi, Arcan, Jakarta

Santoso, Singgih, 2004, Buku latihan SPSS Statistik Parametrik, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta.

Sardjito B dan Osmad Mutaher, 2007, Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating, SNA X, Makassar.

Siskawati, Vidya. 2004, Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Pemda, Skripsi Universitas Bung Hatta,Padang.

Sumarno,J. 2005, Pengaruh Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial, SNA VIII, Solo.

Supomo, Bambang dan Indriantoro, Nur. 1998. Pengaruh Struktur dan Kultur Organisasional terhadap Keefektifan Anggaran Partisipatif dalam Peningkatan Kinerja Manajerial : Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia, Kelola No. 18/VII : 61-84.

Trisnaningsih S, 2007, Independensi Auditor Dan Komitmen Organisasi Sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Good Governance, Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor**,** SNA X, Makassar.